

**BAB V**  
**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**5.1 Hasil Penelitian**

**5.1.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal di Kota Jambi**

Peningkatan pada PAD guna mendanakan pembangunan di wilayahnya diukur melalui RDDF. Desentralisasi fiskal diukur dalam satuan presentase.

Tabel 5.1 Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Tahun	Realisasi PAD (Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	RDDF (%)	Kriteria
2001	15.091.877,627,07	155.550.849.374,64	9,70	Sangat Rendah
2002	18.796.320.380,57	203.129.621.544,98	9,25	Sangat Rendah
2003	19.590.117.000	269.096.641.000	7,27	Sangat Rendah
2004	32.096.106.601,02	300.996.160.859,47	10,66	Sangat Rendah
2005	35.947.627.688,80	334.669.800.362,93	10,74	Sangat Rendah
2006	43.323.298.454,14	466.480.992.050,01	9,29	Sangat Rendah
2007	55.671.281.869,55	608.555.058.533,55	9,14	Sangat Rendah
2008	54.075.188.473,39	593.040.247.808,79	9,12	Sangat Rendah
2009	55.671.281.869,55	608.555.058.533,55	9,14	Sangat Rendah
2010	70.842.049.481,02	692.168.599.886,02	10,23	Rendah
2011	98.999.978.722,48	751.931.826.892,31	13,16	Rendah
2012	91.179.957.018,00	883.399.425.045,00	10,32	Rendah
2013	113.090.195,12	1.018.844.161.697,71	11,09	Rendah
2014	246.427.699.826,28	1.320.648.890.197,28	18,66	Rendah
2015	263.925.520.119,42	1.387.222.252.820,42	19,02	Rendah
2016	287.564.676.904,49	1.571.681.939,47	18,30	Rendah
2017	397.295.029.579,10	1.500.600.420.236,70	26,47	Sedang
2018	338.891.882.592,96	1.623.245.351.694,19	20,87	Sedang
2019	393.429.595.383,99	1.699.542.709.763,06	23,15	Sedang
2020	355.674.818.034,49	1.621.827.275.396,39	21,93	Sedang
2021	384.007.565.070,46	1.652.119.462.753,46	23,24	Sedang
2022	437.025.956.388,00	1.688.797.755.118,80	25,87	Sedang
2023	448.464.707.332,74	1.662.720.516.473,74	26,97	Sedang
Rata-rata			15,4	Rendah

Sumber: Badan Pusat Statistik ( data diolah, 2025)

Berdasarkan tabel 5.1 RDDF pada Kota Jambi mengalami peningkatan dari tahun 2001 hingga 2023. Pada awal periode 2001-2023, nilai RDDF masih tergolong Rendah dimana perolehan rata-rata dibawah 13%. Sejak tahun 2012 RDDF mulai meningkat meskipun masih berada dalam kategori Rendah hingga sekitar tahun 2016. Mulai tahun 2017 masuk ke kategori sedang, menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam tingkat desentralisasi fiskal. Maka, dapat disimpulkan periode 2001-2011 masih tergolong sangat Rendah tetapi setelah 2017 mulai tergolong sedang, hal tersebut memperlihatkan jika pengelolaan PAD yang semakin membaik. Tren ini mencerminkan keberhasilan Kota Jambi dalam meningkatkan kontribusi PAD atas total pendapatan daerah serta meminimalisir ketergantungan pada dana pusat.

### **5.1.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah**

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah menunjukkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap transfer dari Pemerintah Pusat untuk membiayai total pendapatan daerahnya. Semakin tinggi persentasenya, semakin besar ketergantungannya. Dengan membandingkan total pendapatan daerah dengan penerimaan jumlah pendapatan transfer oleh pendapatan daerah, dihitung melalui Rasio Ketergantungan Keuangan. Peningkatan pada rasio ini akan terus berlangsung ketika pemerintah daerah semakin bergantung pada pemerintah pusat atau provinsi. Derajat ketergantungan keuangan daerah pada pendapatan eksternal, terutama pendapatan yang dialihkan, ingin diukur melalui rasio ketergantungan keuangan.

Daerah dipandang sudah mandiri serta memiliki manajemen anggaran yang baik apabila rasio ketergantungan keuangan daerah diketahui rendah pada transfer pemerintah pusat. Hibah dan bagi hasil merupakan sumber finansial utama bagi pemerintah kabupaten dan kota, yang mendapatkan aliran dana dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah atau Provinsi. Aliran dana tersebut mempunyai tujuan pokok yakni guna menciptakan kesetaraan serta efisiensi yang dapat meningkatkan daya beli Pemerintah Kabupaten/Kota, sehingga bisa mengurangi ketimpangan fiskal di antara pemerintah.

Tabel 5.2 Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Tahun	Pendapatan Transfer (Rupiah)	Total Pendapatan Daerah (Rupiah)	RKKD (%)	Kriteria
2001	135.010.920.928,57	155.550.849.374,64	86,79	Sangat Tinggi
2002	184.333.301.164,41	203.129.621.544,98	90,74	Sangat Tinggi
2003	210.024.152.000	269.096.641.000	78,04	Sangat Tinggi
2004	254.879.837.758,45	300.996.160.859,47	84,67	Sangat Tinggi
2005	292.739.782.672,45	334.669.800.362,93	87,47	Sangat Tinggi
2006	420.590.220.655,87	466.480.992.050,01	90,16	Sangat Tinggi
2007	501.408.852.421,00	608.555.058.533,55	82,39	Sangat Tinggi
2008	503.237.017.811,00	593.040.247.808,79	84,85	Sangat Tinggi
2009	501.408.852.421,00	608.555.058.533,55	82,39	Sangat Tinggi
2010	621.326.550.405,00	692.168.599.886,02	89,76	Sangat Tinggi
2011	603.816.206.120,00	751.931.826.892,31	80,30	Sangat Tinggi
2012	687.181.070.084,00	883.399.425.045,00	77,78	Sangat Tinggi
2013	741.677.106.228,00	1.018.844.161.697,71	72,79	Sangat Tinggi
2014	1.064.949.342.896,00	1.320.648.890.197,28	80,63	Sangat Tinggi
2015	858.677.840.368,00	1.387.222.252.820,42	61,89	Sangat Tinggi
2016	1.177.857.284.198,00	1.571.371.681.939,47	74,95	Sangat Tinggi
2017	1.013.005.895.282	1.500.600.420.236,70	67,50	Sangat Tinggi
2018	1.110.714.904.091	1.623.245.351.694,19	68,42	Sangat Tinggi
2019	1.246.099.286.412,07	1.699.542.709.763,06	73,31	Sangat Tinggi
2020	1.036.458.974.832,00	1.621.827.275.396,39	63,90	Sangat Tinggi
2021	1.206.026.802.746,00	1.652.119.462.753,46	72,99	Sangat Tinggi
2022	1.083.896.725.044,00	1.688.797.755.118,80	64,95	Sangat Tinggi
2023	1.050.095.174.631,00	1.662.720.516.473,74	63,15	Sangat Tinggi
Rata-rata			73,17	Sangat Tinggi

Sumber: Badan Pusat Statistik ( data diolah, 2025)

Berlandaskan tabel 5.2 memperlihatkan nilai rata-rata RKKD pada periode 2001-2023 sebesar 73,17% yang berarti masuk dalam kategori sangat tinggi. Pada tahun 2001-2011 RKKD berada di atas 80% artinya ketergantungan pemerintah pusat sangat tinggi, dan pada tahun 2012-2023 RKKD mulai menunjukkan tren penurunan secara bertahap hingga seitar 54-65% pada tahun-tahun terakhir akan

tetapi masih masuk kategori sangat tinggi. Maka dapat disimpulkan Kota Jambi sangat tergantung pada transfer pemerintah pusat. Peningkatan PAD menjadi faktor utama yang dapat mendorong penurunan RKKD.

## **5.2 Pembahasan**

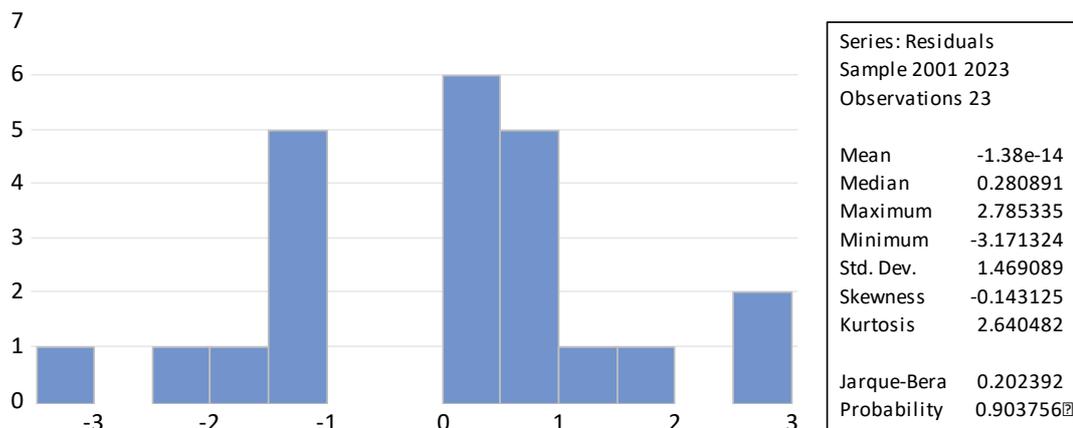
### **5.2.1 Uji Asumsi Klasik**

Uji Asumsi Klasik merupakan serangkaian pengujian statistik yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linier berganda memenuhi asumsi dasar yang dibutuhkan agar hasil analisis valid dan dapat diandalkan. Sebelum melakukan analisis regresi berganda dan pengujian hipotesis, maka harus melakukan beberapa uji asumsi klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah model regresi yang digunakan sudah terbebas dari penyimpangan asumsi dan memenuhi ketentuan untuk mendapatkan linier yang baik.

#### **5.2.1.1 Uji Normalitas**

Pelaksanaan pengujian normalitas yakni guna menelaah distribusi data yang dikaji pada suatu penelitian, apakah tidak normal ataupun normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal keadaan tersebut akan mempengaruhi hasil setiap pengujian yang dijalankan, untuk menentukan apakah data tidak terdistribusi secara normal ataupun terdistribusi secara normal, sebuah metode yang mampu diterapkan yakni *Jarque-Bera*.

Hasil uji *Jarque-Bera* ditunjukkan jika nilai *probability* ( $>0,05$ ) maka data tersebut terdistribusi normal, tetapi jika nilai *probability* ( $<0,05$ ) maka data tersebut tidak terdistribusi normal.



Gambar 4 Hasil Uji Normalitas

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Melalui nilai Probabilitas *Jarque Bera* sebesar 0,903756 ( $>0,05$ ) yang berasal dari hasil pengujian normalitas, dapat dikatakan jika data sudah terdistribusi secara normal.

### 5.2.1.2 Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas mempunyai tujuan guna memeriksa apakah data yang diperoleh menunjukkan pola tertentu atau tidak. Apabila pola tertentu muncul, berarti heteroskedastisitas tidak terjadi. Sebaliknya, jika pola tertentu terbentuk, maka heteroskedastisitas akan terjadi.

Tabel 5.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.902427	Prob.F(5, 17)	0.5020
Obs*R-squared	4.824212	Prob.Chi-Square (5)	0.4377
Scaled explained SS	2.992073	Prob.Chi-Square (5)	0.7012

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Dari hasil uji heteroskedastisitas menggunakan uji *white*, memperlihatkan bahwasannya nilai *Prob. Chi-Square* 0.4377 ( $>0,05$ ) maka dapat disimpulkan jika sudah terpenuhinya asumsi uji heteroskedastisitas serta tidak ditemukan heteroskedastisitas.

### 5.2.1.3 Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas yakni pengujian asumsi klasik dalam regresi berganda guna mengetahui adanya korelasi atau keterkaitan antara variabel bebas. Uji ini diterapkan untuk memastikan model regresi tidak memiliki multikolinearitas.

Tabel 5.4 Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	3.515641	34.05992	NA
RDDF	0.002551	6.955148	1.078025
RKKD	0.000408	22.25774	1.078025

Sumber: Hasil olah data Eviwes 12, 2025

Output hasil pengujian, nilai *VIF* variabel independen yang masuk ke dalam model memiliki nilai ( $<10,00$ ) jadi, bisa ditarik suatu kesimpulan jika asumsi uji multikolinearitas telah terpenuhi atau tidak ditemukan gejala multikolinearitas.

### 5.2.1.4 Uji Autokorelasi

Pengujian ini mempunyai tujuan guna menentukan korelasi yang mungkin terjadi antara kesalahan residual pada waktu  $t$  serta kesalahan pada waktu  $t_1$  pada suatu model regresi linear. Jika terdapat korelasi tersebut, fenomena ini dikenal sebagai masalah autokorelasi. Regresi dipandang baik jika terbebas dari permasalahan autokorelasi. Identifikasi keberadaan autokorelasi pada suatu model regresi dapat dilaksanakan melalui pengujian Uji *Langrange Multiplier (Lm Test)*.

- Jika nilai *Probability Obsquared* ( $<0,05$ ), mampu disimpulkan jika tidak terpenuhinya asumsi pengujian autokorelasi.
- Jika nilai *Probability Obsquared* ( $>0,05$ ), mampu disimpulkan jika sudah terpenuhinya asumsi pengujian autokorelasi.

Tabel 5.5 Hasil Uji Autokorelasi

F-statistic	1.456926	Prob. F (2,18)	0.2591
Obs*R-squared	3.204507	Prob. Chi-Square (2)	0.2014

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Hasil dari Uji Autokorelasi menunjukkan nilai *Probability Obs\*R-squared* yang tercatat ialah 0. 2014 (>0. 05). Dari sini, mampu ditarik suatu ringkasan jika tidak ada masalah autokorelasi, dan syarat untuk data uji autokorelasi telah dipenuhi.

### 5.2.2 Hasil dan Pembahasan Perhitungan Regresi Linier Berganda

Metode yang dijalankan guna mengamati pengaruh yang ditimbulkan Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Kota Jambi yakni melalui perhitungan analisis regresi linear berganda. Perolehan hasil dari perhitungan pengujian ini yang sudah dilaksanakan dengan memanfaatkan *software Eviews*, antara lain:

Tabel 5.6 Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	72.18638	1.875004	38.49931	0.0000
RDDF	0.319396	0.050507	6.323755	0.0000
RKKD	-0.025501	0.020205	-1.262093	0.2214

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Berlandaskan hasil analisis, maka pada penelitian ini persamaan regresi berganda yakni:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 RDDF + \beta_2 RKKD + \varepsilon$$

$$Y = 72.18638 + 0.319396 RDDF - 0.025501 RKKD$$

- Perolehan nilai konstanta sejumlah 72.18638 serta tanda positif (+) RDDF diartikan jika rata-rata RRDF, RKKD diasumsikan tetap atau tidak terjadi perubahan maka tingkat IPM sebesar 72.18638.

- Nilai Koefisien Regresi Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal bernilai positif (+) sebesar 0.319396, maka bisa diartikan bahwa jika variabel Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal meningkat maka Indeks Pembangunan Manusia akan ikut menurun sebesar 0.319396.
- Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah memperoleh nilai konstanta regresi yang bernilai negatif (-) yakni sejumlah -0.025501. Oleh karenanya, mampu ditarik suatu kesimpulan jika Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mengalami peningkatan, maka akan terjadi penurunan pada Indeks Pembangunan Manusia yakni sejumlah 0.025501.

### 5.2.3 Uji Parameter Regresi

#### 5.2.3.1 Uji F ( Uji Simultan )

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui secara simultan/secara bersama-sama variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen. Berdasarkan probabilitas jika probabilitas >5% maka  $H_0$  yakni variabel bebas tidak secara simultan berpengaruh atas variabel terikat, serta jika probabilitas <5%  $H_1$  yakni secara simultan variabel bebas berpengaruh atas variabel terikat.

Tabel 5.7 Hasil Uji F

F-statistic	24.72833
Prob(F-statistic)	0.000004

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Berdasarkan *output* diatas yang ditunjukkan, nilai *F-Statistic* tercatat sebesar 24. 72833 serta nilai Prob (*F-Statistic*) sebesar 0. 000004 (<0,05). Dari sini, dapat ditarik suatu kesimpulan jika secara bersamaan variabel bebas (X) memiliki pengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Y).

#### 5.2.3.2 Uji t ( Uji Parsial)

Uji t dilaksanakan guna memperlihatkan pengaruh yang ditimbulkan rasio derajat desentralisasi fiskal serta rasio ketergantungan keuangan daerah terhadap

IPM (Indeks Pembangunan Manusia). Dalam menguji variabel bebas atas variabel terikat, penting guna memastikan bahwa variabel tidak terpengaruh secara signifikan jika probabilitas >5%, serta jika variabel tersebut dipengaruhi secara signifikan oleh probabilitas <5%.

Tabel 5.8 Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	72.18638	1.875004	38.49931	0.0000
RDDF	0.319396	0.050507	6.323755	0.0000
RKKD	-0.025501	0.020205	-1.262093	0.2214

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Dari hasil pengelolaan data eviwes, maka dapat disimpulkan antara lain:

1. Rasio derajat desentralisasi fiskal mempunyai perolehan nilai *t-Statistic* sejumlah 6.323755 dimana nilai *probabilitas* sejumlah 0.0000 (<0,05). Oleh karenanya, mampu ditarik sebuah kesimpulan jika variabel RDDF secara signifikan serta positif berpengaruh terhadap variabel IPM.
2. Rasio ketergantungan keuangan daerah mempunyai perolehan nilai *t-Statistic* sejumlah -1. 262093 dimana nilai *probabilitas* sejumlah 0. 2214 (>0,05). Oleh karenanya, mampu ditarik sebuah kesimpulan jika variabel RKKD tidak secara signifikan berpengaruh terhadap variabel IPM.

### 5.2.3.3 Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Pada penelitian ini, pengujian koefisien determinasi diterapkan guna mengevaluasi dampak dari variabel bebas atas suatu variabel terikat. Kisaran nilai dari koefisien determinasi yakni antara 0 sampai 1. Dipandang efektif variabel bebas mampu mengungkapkan variabel terikat apabila perolehan nilai koefisien determinasi mengarah pada angka 1 (satu). Sebaliknya, variabel bebas tidak mampu mengungkapkan variabel terikat secara memadai jika mendekati 0 (nol).

Tabel 5.9 Hasil Uji Determinasi ( $R^2$ )

<i>R-squared</i>	0.712051
<i>Adjusted R-squared</i>	0.683256

Sumber: Hasil Olah Data Eviwes 12, 2025

Diketahui nilai *Adjusted R-squared* sejumlah 0.712 oleh karenanya berkesimpulan bahwa sumbangan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara simultan (bersamaan) sebesar 71,2%. Sedangkan sisanya sebesar 28,8% dipengaruhi variabel lain diluar penelitian ini.

### 5.3 Analisis Ekonomi

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal mendapatkan nilai yakni *t-Statistic* sejumlah 6.323755 dimana peroleh nilai *probabilitas* sejumlah 0.0000 ( $<0,05$ ), oleh karenanya mampu ditarik sebuah simpulan jika variabel rasio derajat desentralisasi fiskal membawa dampak pengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia Penelitian ini sejalan dengan Harliyani & Haryadi (2016), Astuti & Mispiyanti (2019), Purnamawati & Hudaya (2020), Zulkarnain (2020), Sari & Riharjo (2020), Riksa Wibawa & Arif (2022), Winarni et al (2022), Rizkika & Firmansyah (2023) menyebutkan bahwasannya rasio derajat desentralisasi fiskal secara signifikan serta positif berpengaruh terhadap IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah mendapatkan nilai *t-Statistic* yakni sejumlah -1.262093 dimana perolehan nilai *probabilitas* sejumlah 0.2214 ( $>0,05$ ), oleh karenanya mampu ditarik sebuah ringkasan jika variabel rasio ketergantungan keuangan daerah tidak memberikan pengaruh terhadap variabel indeks pembangunan manusia (Y). Berdasarkan hasil temuan penelitian ini sesuai dengan Harliyani & Haryadi (2016), Astuti & Mispiyanti (2019), Riksa Wibawa & Arif (2022), Winarni et al (2022) yang mengatakan jika IPM (Indeks Pembangunan Manusia) tidak secara signifikan dipengaruhi oleh rasio ketergantungan keuangan daerah.

#### **5.4 Implikasi Kebijakan**

Implikasi Kebijakan adalah dampak atau konsekuensi yang dihasilkan dari kebijakan terhadap suatu wilayah. Implikasi kebijakan dapat dikaitkan dengan temuan penelitian yang dilakukan. Implikasi dari penelitian ini bertujuan agar mengetahui bahwa pencapaian hasil kerja daerah dengan menggunakan indikator keuangan guna mengukur kapabilitas pengelolaan keuangan suatu daerah dikenal sebagai kinerja keuangan daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang diukur dengan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal memberikan pengaruh signifikan terhadap IPM oleh karenanya, Pemerintah Kota Jambi harus melakukan langkah-langkah strategis sebagai usaha menaikkan derajat desentralisasi fiskal. kebijakan yang mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus diperkuat guna meminimalisir ketergantungan pada dana pusat serta meningkatkan kapasitas daerah. Optimalisasi pendapatan daerah harus dilaksanakan Pemerintah Daerah, seperti retribusi serta pajak daerah yang akan mempengaruhi pendapatan asli daerah.

Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Jambi yang dinilai berlandaskan pada perhitungan Rasio Ketergantungan keuangan daerah tidak secara signifikan memberikan pengaruh terhadap IPM di Kota Jambi. Akan tetapi Pemerintah Daerah juga perlu melaksanakan optimalisasi potensi daerah guna mengurangi ketergantungan daerah agar tidak kebergantungan. Dengan memaksimalkan sumber pendapatan daerah untuk kesejahteraan masyarakat, ketergantungan yang tinggi dapat mengurangi kemandirian suatu daerah.

Pemerintah Daerah Kota Jambi dapat mengoptimalkan kenaikan PAD dengan menerapkan pemungutan retribusi dan pajak daerah seefisien mungkin serta dengan melaksanakan manajemen serta pengawasan sistematis secara jangka panjang. Ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat perlu diminimalisir, yang mana pemerintah diharuskan mengambil inisiatif untuk mengidentifikasi sumber pendanaan alternatif.